

ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA KERAJINAN ANYAMAN SEBAGAI KOMODITI UNGGULAN DALAM KERANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Studi Kasus di Desa Taratak Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota

Ferdhinal Asful

Abstract: *this study aims to (1) study karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman, (2) analyze the characteristic's usaha kerajinan anyaman sebagai komoditi unggulan, (3) memahami strategi dan kebijakan lembaga di tingkat desa dan instansi pemerintah terkait sehubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat. The study result show that di satu sisi, karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman berada pada kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang diperlihatkan dengan banyaknya keterbatasan dalam hal kepemilikan terhadap aspek sumberdaya manusia. Sementara pada sisi yang lain, usaha kerajinan anyaman sebagai usaha ekonomi rakyat belum berkembang karena rendahnya akses terhadap sumberdaya ekonomi produktif, yang meliputi: modal, pasar, sarana prasarana pendukung, serta keterisoliran letak desa menambah ketidakberdayaan pengrajin dalam pengembangan usaha. Finally, akibat akumulasi persoalan pada tataran kelembagaan yang tidak akomodatif, baik lembaga pemerintahan desa maupun lembaga ekonomi desa, serta jenis program pembinaan instansi pemerintah terkait kurang cocok dengan kebutuhan pengrajin, maka strategi dan program yang telah dijalankan pemerintah belum berperan dalam memberdayakan usaha ekonomi rakyat kerajinan anyaman di Desa Taratak Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota*

Kata Kunci : *pemberdayaan ekonomi rakyat, akses sumberdaya produktif, akses kelembagaan yang akomodatif*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan kesenjangan yang nyata dan kesejahteraan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat lapisan ekonomi atas dibanding lapisan masyarakat miskin. Nugroho (1997) menyatakan bahwa persoalan ketimpangan ekonomi merupakan salah satu penyebab

munculnya persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan yang selalu menyertai setiap hasil-hasil pembangunan. Dengan kata lain, Kartasasmita (1996) melihat bahwa persoalan kemiskinan dipengaruhi oleh faktor struktural yang tidak memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengakses sumber-sumber kemajuan ekonomi.

Chambers dalam Pranarka dan Moeljarto (1996) menawarkan upaya untuk mengatasi situasi ketidakberdayaan atau kemiskinan dengan

pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai suatu paradigma dominan dalam pembangunan yang diikuti dengan peralihan kekuatan rakyat dari sebagai objek menjadi subjek pembangunan. Sejalan dengan itu, Kartasasmita (1996) mengedepankan suatu pemikiran baru sebagai arah strategi pembangunan yang dikenal dengan istilah *people centered development* atau yang dikenal dengan paradigma pemberdayaan masyarakat.

Dari paradigma pemberdayaan masyarakat, mengemuka terminologi pemberdayaan ekonomi rakyat dengan artian upaya kearah mendorong percepatan perubahan struktural melalui perluasan akses rakyat dalam memanfaatkan sumberdaya produktif untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat. Disamping itu, strategi pemberdayaan ekonomi rakyat juga terkait dengan akses terhadap kelembagaan yang akomodatif dan responsif (Baswir, 1997), dalam mengagregasikan kemampuan dan pencapaian tujuan bersama dan selanjutnya memperkuat posisi tawar-menawar (*bargaining position*) masyarakat desa (Juoro, 1998).

Perumusan Masalah

Persoalan besarnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat merupakan permasalahan kompleks yang terus diupayakan untuk mencari solusi yang sesuai. Selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat yang ada cenderung menyamaratakan permasalahan masyarakat sebagai suatu kebutuhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti tanpa lebih dahulu mengkaji tantang permasalahan dan kebutuhan masyarakat itu lebih jauh. Sehingga ini berakibat pada sering terjadinya

program pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Fakta persoalan kemiskinan di Sumatera Barat dapat menjelaskan bahwa perlu adanya penerapan pendekatan yang terarah. Pada posisi inilah penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi penting agar masyarakat menjadi semakin berdaya untuk mengejar ketertinggalannya. Rumusan konkret pendekatan ini dijabarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui “Gerakan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa-Komoditi Unggulan (*One Village One Product*)” sebagai sebuah strategi pembangunan pedesaan di Sumatera Barat. Untuk teknis pelaksanaannya, di Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan konsep “Strategi Pengembangan Daerah (*Gerakan Ekonomi menuju Masyarakat yang Aman dan Sejahtera/GEMAS*)” yang memprioritaskan pembangunan pedesaan berdasarkan perwilayahan komoditi ke dalam empat wilayah komoditi unggulan (1).

Desa Taratak sebagai sebuah desa miskin termasuk pada perwilayahan komoditi unggulan industri kecil dengan komoditi kerajinan anyaman *mansiang* (2) sebagai usaha ekonomi rakyat. Kondisi aktualnya, usaha ekonomi rakyat ini belum berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji faktor penyebab ketidakberdayaan dan kemiskinan masyarakat Desa Taratak yang tercermin dari tidak berkembangnya usaha ekonomi rakyat selama ini apakah disebabkan karena lemahnya akses terhadap sumberdaya produktif dan kelembagaan yang tidak akomodatif ? Untuk itu, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat

yang lebih terarah dan jelas, baik dari segi konsep, strategi, dan pelaksanaan. Pada akhirnya, kesemuanya ini bermuara kepada upaya untuk menemukan kerangka jawaban guna menjawab permasalahan yang ada di seputar pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mempelajari karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman dalam konteks pemberdayaan
2. Menganalisis karakteristik usaha kerajinan anyaman sebagai komoditi unggulan dalam konteks pemberdayaan
3. Memahami peran kelembagaan sehubungan dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini memanfaatkan rumah tangga yang mengusahakan usaha ekonomi rakyat berupa kerajinan anyaman *mansiang* sebagai unit analisis. Pemilihan sejumlah 50 sampel pengrajin dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* dan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, panduan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Untuk tujuan pertama, digunakan variabel sumberdaya manusia yang terdiri dari: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pelatihan, keterampilan, jenis pekerjaan, alternatif pekerjaan, pengalaman berusaha, dan status sosial

(Bachtiar, 1997; Kartasasmita, 1996; Syarief, 1998; Sjafrizal, 1997).

Tujuan kedua, digunakan variabel: (a) teknis-produksi (ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga terampil dan peralatan produksi, kemampuan produksi dan penggunaan teknologi, serta kualitas produk; (b) ekonomi-manajemen (kewirausahaan, potensi permintaan, pemasaran produk dan kondisi persaingan, biaya produksi, serta kelembagaan pendukung (Sjafrizal, 1997; Syarief, 1998; Kartasasmita, 1996; Bachtiar, 1997). Tujuan ketiga akan dianalisis temuan wawancara dan studi dokumen terkait peran kelembagaan dalam pengembangan ekonomi rakyat. Ketiga tujuan ini akan dianalisis secara mendalam dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) dan diperkuat dengan ahli-ahli lain (Chambers, 1989 dalam Sarman, 1997; Thorbecke, 1993 dalam Raharjo dan Rinakit, 1996; Moeljarto, 1996; Pranarka dan Moeljarto, 1996; Kluckhohn dan Stroedbeck, 1967 dalam Ichsan, 1994; Valde, 1993 dalam Firdausy, 1997; Prijono, 1996; Raharjo dan Rinakit, 1996; Martius, 1997)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Ekonomi Rumah Tangga Pengrajin

Adapun karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman adalah : umumnya berada pada kelompok umur produktif (20-49 tahun), berjenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan relatif rendah, jumlah anggota keluarga relatif banyak, mayoritas tidak pernah mendapatkan penguatan SDM melalui pelatihan, tingkat keterampilan relatif

baik, motifs pekerjaan bervariasi (utama dan sampingan), pengalaman berusaha cukup lama, serta status sosial umumnya sebagai warga masyarakat biasa.

Karakteristik Usaha Kerajinan Anyaman sebagai Komoditi Unggulan

Adapun karakteristik usaha kerajinan anyaman dari sisi faktor teknis-produksi memperlihatkan bahwa bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup di tingkat lokal namun terkendala dalam hal bahan pewarna yang harus didatangkan dari luar, tenaga terampil cukup tersedia, kemampuan produksi relatif sedang, penggunaan teknologi yang cukup sederhana, serta kualitas produk yang relatif terbatas. Sedangkan dari sisi faktor ekonomi-manajemen, terlihat bahwa pengrajin memiliki jiwa kewirausahaan yang baik, potensi permintaan yang cukup tinggi, jaringan pemasaran yang luas namun terkendala di tingkat desa dan persaingan yang kurang dari komoditi sejenis, permodalan atau biaya produksi yang masih terbatas, serta dukungan kelembagaan yang kurang responsif.

Pada akhirnya berdasarkan tinjauan karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin dan karakteristik usaha kerajinan yang dijalankan bermuara pada belum berkembangnya secara ekonomi usaha kerajinan anyaman yang dilakukan masyarakat di Desa Taratak walaupun usaha ini telah dilakukan masyarakat desa sejak turun-temurun. Lebih jauh akan dilakukan analisis kondisi di atas melalui kajian pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks usaha kerajinan anyaman.

Konsep Lokal tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Konteks Kerajinan Anyaman di Desa Taratak

Analisis konsep lokal tentang pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks kerajinan anyaman di Desa Taratak ini lebih menekankan kepada aspek kualitatif dengan mengacu kepada konsep dan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) yang menjadi kerangka pemikiran penelitian ini serta didukung dengan beberapa teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Secara terperinci bagian ini membahas dan menganalisis tentang aspek pemberdayaan sumberdaya produktif dan pemberdayaan kelembagaan.

a. Akses terhadap Sumberdaya Produktif

a.1. Ketidakberdayaan Rumah Tangga Miskin

Secara umum keberadaan mayoritas rumah tangga pengrajin berada pada kondisi kemiskinan yang diperlihatkan dengan banyaknya keterbatasan dalam hal kepemilikan sumberdaya produktif. Keberadaan rumah tangga yang mayoritas berada di pinggiran desa, serta letak desa yang terisolir, tanpa disadari menjadi suatu perangkat bagi kemiskinan masyarakat desa dan rumah tangga pengrajin. Kondisi yang memerangkap rumah tangga ini cenderung memunculkan perangkat lain yang diistilahkan Chambers (1989) dalam Sarman (1997) dengan ketidakberuntungan pada kelompok rumah tangga miskin yang dicirikan dengan terdapatnya kondisi keterbatasan dalam hal kepemilikan asset,

fisik lemah, keterisolasian, kerentanan, dan ketidakberdayaan.

Pada sisi lain, kondisi kemiskinan rumah tangga pengrajin juga dicirikan oleh rumah tempat tinggal mereka yang amat sederhana sebagai wujud dari ketiadaan biaya untuk memperbaikinya. Keterbatasan ini ditambah lagi dengan keterbatasan kepemilikan lahan, bahkan ada yang hanya bekerja sebagai buruh tani, yang menurut Thorbecke (1993) dalam Raharjo dan Rinakit (1996) dikategorikan ke dalam kelompok yang hidupnya paling menderita. Lebih jauh dijelaskan bahwa kelompok ini dengan kepemilikan lahan yang sempit (kecil dari 0,5 ha dan bahkan tidak punya lahan) mengakibatkan mereka hanya mampu memproduksi sedikit hasil pertanian pangan, sehingga pendapatan merekapun sangat kecil yang bahkan tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Secara lebih terperinci, tidak berkembangnya usaha ekonomi rakyat di Desa Taratak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadikan mereka tidak berdaya selama ini, yakni: *pertama*, status sosial pengrajin yang umumnya rendah (hanya warga masyarakat biasa), sehingga cenderung memposisikan rumah tangga pengrajin pada kondisi ketidakberdayaan. Ini berdampak pada lemahnya posisi tawar-menawar mereka terhadap pembuatan keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh para elite desa menyangkut usaha ekonomi rakyat yang mereka jalankan. Kondisi ini, oleh Moeljarto (1996) dilihat sebagai hubungan antar individu atau lapisan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait (*interlinking factors*), yakni: pendidi-

kan, keterampilan, status sosial, harta, kedudukan, dan jenis kelamin. Faktor yang saling terkait ini pada akhirnya membuat hubungan antar individu dengan dikotomi subjek (elite desa) dengan objek (masyarakat desa). Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subjek dan objek tersebut merupakan relasi yang ingin diperbaiki melalui proses pemberdayaan. Kondisi dikotomi ini, mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat (baca: pengrajin) dalam menghadapi para elite desa (baca: aparat desa dan pengurus lembaga ekonomi desa/-Kopinkra). Kondisi ini membuat para elite desa secara sepihak menentukan para pengrajin yang mengikuti kegiatan pembinaan sumberdaya manusia (pelatihan, penyuluhan, dan pameran). Penuturan salah seorang pengrajin membuktikan fakta tersebut: *"Sebenarnya saya ingin sekali ikut kegiatan pelatihan anyaman yang diadakan di Desa Kubang, namun pengrajin yang ikut ditentukan sepihak oleh pengurus kopinkra. Apabila mempunyai hubungan dekat dan duduk sebagai pengurus, maka akan semakin besar peluang untuk ikut pelatihan"*.

Disini terlihat bahwa pola-pola pembinaan sumberdaya manusia yang tidak kondusif, yakni lebih bersifat nepotisme, rasa suka tidak suka (*like and dislike*), pendekatan kekuasaan, sehingga rasa apriori tumbuh subur di kalangan pengrajin terhadap elite desa, terutama terhadap pengurus kopinkra. Ini dibuktikan dengan temuan lapangan bahwa umumnya para pengrajin apabila menemui kesulitan dalam berproduksi, lebih memilih untuk mencari jalan keluar dengan berdiskusi sesama pengrajin dibandingkan dengan menanyakan

kepada pihak yang berkompeten (aparatus desa atau pengurus kopinkra). Kartasasmita (1996) menyoroti hal ini sebagai kondisi yang ada dalam masyarakat di negara berkembang, dimana pada masyarakat lapisan bawah (petani, pengrajin, dll) dianggap diperlukan, namun bukan merupakan kelompok yang menduduki jenjang tinggi dalam status sosial. Rendahnya penghargaan yang diberikan kepada kegiatan ekonomi rumah tangga kerajinan anyaman ini membawa akibat yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan dan kemajuan usaha ekonomi rakyat itu sendiri. Dari sisi pendekatan pemberdayaan, kondisi diatas oleh Kartasasmita (1996) dinyatakan sebagai belum adanya kondisi atau iklim yang memungkinkan bagi berkembangnya potensi yang ada pada masyarakat (baca: pengrajin).

Kedua, kecilnya skala usaha yang dilakukan pengrajin sehingga hasil usaha yang diperoleh lebih diprioritaskan dan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun terdapat sedikit kelebihan usaha, namun itupun digunakan untuk mencicil pinjaman di Kopinkra dan untuk modal pembeli bahan baku bagi produksi berikutnya. Sehingga hampir tidak ada hasil usaha yang bisa di simpan atau di tabung. Akibatnya pengembangan usaha mayoritas pengrajin hampir tidak pernah ada. Tambunan (1995) menekankan kondisi ini sebagai adanya keterbatasan untuk bertahan dengan usaha yang dijalankan. Kecilnya skala usaha menyebabkan tidak adanya sisa penjualan yang bisa dijadikan sebagai modal untuk investasi untuk pengembangan usaha. Penuturan salah seorang pengrajin menggambarkan hal

tersebut: *"Hasil penjualan anyaman ini langsung dibelikan kepada barang kebutuhan keluarga sehari-hari, baik berupa beras, lauk-pauk, gula, dll. Segala kebutuhan keluarga kami carikan dari usaha anyaman ini. Walaupun ada sedikit sisa, itupun habis untuk pembayar angsuran pinjaman koperasi, dan untuk pembeli bahan anyaman minggu berikutnya"*.

Ketiga, ketidakberanian para pengrajin untuk mengambil resiko menjadikan usaha kerajinan anyaman sebagai mata pencaharian utama rumah tangga. Meskipun ada, namun mereka umumnya masih melakukan pekerjaan lain, seperti : kesawah, ke ladang, atau beternak. Pendapat Kuncoro (1997) memperkuat temuan ini, bahwa hal yang banyak ditemui pada industri pedesaan, dimana industri tersebut bukan merupakan sumber penghasilan pokok. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu pada siang hari untuk aktifitas ke sawah atau ke ladang, dan baru pada malam harinya membuat kerajinan anyaman sebagai pekerjaan utama. Kondisi dan iklim usaha yang belum memungkinkan, membuat mereka belum mampu berharap terlalu besar pada usaha kerajinan anyaman sebagai mata pencaharian utama rumah tangga. Kartasasmita (1996) melihat fenomena ini sebagai kondisi yang akan mengakibatkan disalurkan energi kreatif seseorang yang paling terampil dan berpengalaman tidak ke arah kegiatan yang akan meningkatkan kapasitas produksi usaha mereka.

Keempat, rendahnya tingkat pendidikan umumnya para pengrajin (setingkat SD dan SLTP) berdampak pada kurangnya kemampuan pengrajin dalam mengelola usaha. Walaupun

bisa bertahan, namun mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan dalam arti yang sebenarnya. Sjafrizal (1997) mengemukakan bawa rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada kemampuan manajemen yang dimiliki dan yang diterapkan dalam usaha. Pengrajin cenderung apatis dan tidak mampu untuk melakukan berbagai upaya terobosan-terobosan bagi pengembangan usaha. Faktor rendahnya tingkat pendidikan ini juga oleh Moeljarto (1996) dijadikan sebagai salah satu penyebab terjadinya dikotomi antara elite desa dengan masyarakat pengrajin sebagai wujud ketidakberdayaan.

Terobosan untuk menyikapi kendala sumberdaya manusia di tingkat desa dilakukan dengan cara mengenalkan seluk-beluk membuat kerajinan anyaman kepada anak didik tingkat sekolah dasar yang ada di Desa Taratak. Keterampilan membuat kerajinan anyaman dijadikan sebagai mata pelajaran anak didik di sekolah (muatan lokal). Melalui proses ini, diharapkan si anak akan menyadari bagaimana realitas kehidupan ekonomi rumah tangga orang tua mereka. Pranarka dan Moeljarto (1996) menyoroti hal ini sebagai upaya untuk mengarahkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pedesaan dengan metode penjelasan realitas sosial di pedesaan, termasuk realitas sosial ketidakberdayaan orangtua si anak sebagai pengrajin. Pada akhirnya pemahaman kondisi ini akan menambah etos kerja dari sebelumnya yang tidak menghargai waktu menjadi etos kerja disiplin dan dinamis.

a.2. Upaya Menyikapi Kondisi Ketidakberdayaan

Dalam upaya menyikapi berbagai kondisi yang kurang memungkinkan bagi pengembangan usaha kerajinan anyaman, maka umumnya rumah tangga pengrajin melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kemampuan dan potensi sumberdaya masing-masing. Dalam hal ini Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi ini pada akhirnya bisa dikategorikan rumah tangga pengrajin anyaman ke dalam dua kategori utama, yakni:

Pertama, kelompok rumah tangga pengrajin yang pasrah saja menerima kondisi rumah tangga dan usaha yang telah berlangsung selama ini. Mereka hanya melakukan aktifitas usaha kerajinan anyaman sebagai penunjuk "identitas diri" sebagai warga desa (*bukan orang Taratak namanya kalau tidak bisa menganyam*) dan tidak banyak berharap dari usaha ini apalagi menjadikannya sebagai sandaran utama rumah tangga. Sarman (1997) mengelompokkan rumah tangga ini ke dalam *kelompok konservatif*, yang cenderung memahami kemiskinan sebagai sesuatu kondisi yang harus diterima sebagai budaya kemiskinan. Kelompok ini dicirikan dengan rumah tangga yang umumnya tinggal di pinggir desa, berusia relatif tua, berpendidikan rendah, dan keterampilan kurang. Hari-harinya habis bekerja di sawah atau di ladang orang lain sehingga kegiatan kerajinan anyaman hanya sebagai sampingan. Mereka berusaha keras untuk mempertahankan hidup dengan segala keterbatasan yang dimiliki, namun hasil yang diperoleh hanya cukup untuk pemenuhan

kebutuhan hidup minimal. Akibatnya tidak ada kemungkinan untuk perkembangan usaha yang diharapkan dari mereka yang rata-rata beromzet kecil.

Kedua, kelompok rumah tangga pengrajin yang cukup kreatif dalam berusaha dimana mereka tidak begitu saja menerima kondisi yang sudah ada. Pendidikan yang cukup tinggi membuat mereka berusaha mencari terobosan dalam pengembangan usaha kerajina anyaman, seperti dengan jalan memasarkan produknya sendiri ke luar desa atau mencari alternatif diversifikasi produk. Kelompok rumah tangga ini umumnya tinggal dekat dengan pusat desa, termasuk kelompok berusia muda, haus informasi, dan cenderung kritis dalam menyikapi segala kondisi yang ada, terutama yang menyangkut usaha rumah tangga yang dilakukan. Kelompok ini menurut Sarman (1997), termasuk ke dalam kelompok yang diistilahkan dengan *kelompok liberal*, yang mampu menyiasati kondisi lingkungan sosial ekonomi, sehingga berpeluang untuk memperbaiki budaya kemiskinan. Mereka tidak ingin generasi keluarganya seperti mereka dan berusaha menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di luar desa dengan biaya dari pinjaman Kopinkra yang dicicil dengan hasil penjualan anyaman. Kelompok yang memiliki omzet dari sedang sampai tinggi ini diduga akan dapat berkembang lebih baik apabila mereka memperoleh akses terhadap berbagai sumber kemajuan usaha kerajinan anyaman, seperti: modal, teknologi, informasi, pasar, dan lain-lain, sehingga dapat memperoleh surplus usaha yang lebih besar.

Kelompok kedua ini, lebih jauh menurut teori sosiologi Kluckhohn dan Stroedbeck (1967) dalam Ichsan (1994) dapat didefinisikan sebagai suatu ciri dari ekonomi rumah tangga yang tergolong ke dalam masyarakat transisi dengan karakteristik sebagai berikut: (1) kecenderungan untuk memandang bahwa hakekat hidup manusia itu buruk tapi wajib berikhtiar ke arah kebaikan. Hal ini tergambar dari upaya pengrajin untuk memanfaatkan waktu siang dan malam dengan efisien guna menambah pendapatan rumah tangga, (2) bahwa tujuan akhir dari semua kerja adalah kehormatan dan kedudukan yang diperlihatkan dengan upaya kerja keras pengrajin untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, (3) berorientasi pada masa lampau dan masa kini yang ditunjukkan dengan usaha untuk menyelaraskan keterampilan yang dikuasai turun-temurun dengan menyerap inovasi, (4) cenderung menyelaraskan diri dengan lingkungan alamnya yang tergambar dari kreatifitas pengrajin dalam berusaha pada saat musim kemarau, serta (5) cenderung merasa tergantung pada tokoh atasan yang berpangkat. Ini terefleksi dari sikap pasrah atas kebijakan pada elite desa menyangkut usaha kerajinan anyaman yang dilakukan pengrajin.

Namun secara umum, kedua kategori rumah tangga pengrajin ini belum mampu mengakses berbagai aspek pengembangan usaha, sehingga pengrajin berada ada kondisi ketidakberdayaan yang secara struktural menyulitkan terjadinya kemajuan usaha ekonomi rumah tangga yang mereka lakukan selama ini. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya upaya yang terarah untuk memperluas akses pengrajin terhadap aspek-aspek

kemajuan usaha. Kartasasmita (1996) menekankan hal ini dengan upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai sisi kedua dari pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang menyangkut aspek-aspek penguatan potensi ini meliputi:

Pertama, keterbatasan akses terhadap permodalan usaha. Struktur permodalan usaha kerajinan anyaman selama ini hanya berasal dari modal sendiri, pinjaman dari pedagang pengumpul, atau pinjaman dari Kopinkra. Kendala permodalan, terutama belum adanya akses terhadap modal perbankan mengakibatkan usaha ini hanya berupa usaha skala kecil yang marginal sebagai cerminan atau sosok dari ekonomi rakyat. Marginalisasi usaha ini terutama dalam hal kemampuan mengakses sumberdaya yang semestinya dapat meningkatkan nilai tambah usaha. Lebih jauh Firdausy (1997) menyatakan bahwa usaha ekonomi rakyat pada umumnya belum terjamah oleh institusi perkreditan yang dikelola sektor perbankan. Alasannya seringkali karena adanya berbagai hambatan struktural dan psikologis atas pembiayaan usaha kecil, misalnya persepsi inferior tentang potensi usaha kecil, khususnya di pedesaan.

Kecilnya peluang untuk untuk mengakses modal perbankan menjadikan kemungkinan kearah pengembangan usaha sangat terbatas, yang oleh Valde (1993) dalam Firdausy (1997) disimpulkan sebagai suatu keterbatasan struktural masyarakat sebagai salah satu yang menyebabkan kemiskinan. Lebih jauh Kartasasmita (1996) menyoroti permasalahan akses terhadap permodalan sebagai upaya transformasi struktural. Tersedianya

kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal. Pada sisi yang lain, persyaratan perbankan yang cukup rumit bagi masyarakat lapis bawah (baca: miskin), cenderung menyebabkan kurangnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang membutuhkannya. Kamaluddin (1990) menyatakan kondisi ini dengan belum dapat dijangkaunya kegiatan usaha masyarakat yang tergolong lemah oleh fasilitas permodalan. Hal ini berdampak pada rentannya posisi ekonomi rakyat dan pelakunya (Firdausy, 1997).

Kedua, keterbatasan akses terhadap pasar. Walaupun usaha kerajinan anyaman ini telah memiliki jaringan pemasaran yang luas namun kondisi riil pemasaran di tingkat desa menunjukkan ketidakberdayaan pengrajin. Transaksi pemasaran lebih didominasi oleh pedagang pengumpul yang cenderung merugikan pengrajin. Kuatnya persatuan di antara pedagang pengumpul, akhirnya menempatkan pengrajin pada posisi yang lemah dan tidak ada alternatif selain menjual kepada para pedagang pengumpul. Ilustrasi berikut melalui wawancara dengan salah seorang pengrajin dapat menjelaskan fenomena ini: "*Kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi mereka (toke). Kalau kami agak bertahan harga terhadap tawaran seorang toke, maka mereka enggan menanggapi, begitu pula toke yang lain-pun akan bersikap sama. Akhirnya tidak ada jalan lain selain menerima tawaran mereka.*"

Anyaman ini harus terjual hari itu juga, karena uangnya dibutuhkan untuk pembeli kebutuhan keluarga". Realitas ini menunjukkan lemahnya posisi tawar menawar pengrajin dalam hal akses terhadap pasar sebagai wujud dari ketidakberdayaan. Priyono (1996) cenderung memahami kondisi ini sebagai wujud ketidakberdayaan rakyat, sehingga melemahkan posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah (baca: miskin) terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala sektor kehidupan.

Ketiga, keterbatasan akses terhadap sarana prasarana pendukung. Belum tersedianya prasarana jalan desa dan sarana transportasi desa yang memadai serta keterpencilan letak desa, menambah keterpurukan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan usaha. Ini berkaitan erat dengan tidak adanya alternatif umumnya pengrajin selain memasarkan produknya di dalam desa saja, karena untuk memasarkan keluar desa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pemberdayaan dalam hal ini adalah upaya untuk menyediakan berbagai fasilitas prasarana jalan dan sarana transportasi yang memadai. Kartasasmita (1996) menekankan bahwa proses pemberdayaan ekonomi rakyat tak akan cukup bermanfaat bagi masyarakat apabila mereka hidup terpencil atau tidak dapat memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada di wilayahnya. Untuk itu, dibutuhkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai.

b. Akses terhadap Kelembagaan

Secara umum, tidak berkembangnya usaha ekonomi rakyat kerajinan anyaman disebabkan oleh

akumulasi berbagai persoalan yang terjadi pada tataran kelembagaan, dari tingkat desa (lembaga pemerintah desa dan lembaga ekonomi desa) dan tingkat instansi pemerintah/swasta (Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, dll) melalui berbagai kebijakan/peraturan dan program pembinaan usaha masyarakat. Kompleksitas persoalan pada tataran kelembagaan ini berakibat pada ketidakberdayaan masyarakat, khususnya pengrajin anyaman.

Pada tingkat desa, keberadaan lembaga pemerintahan desa dan aparatnya belum mampu memberikan perlindungan terhadap posisi pengrajin yang lemah dalam bertransaksi dengan pedagang pengumpul. Padahal sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan di tingkat desa, para pengrajin sangat mengharapkan adanya aturan main yang jelas terkait harga produk anyaman yang saling menguntungkan antara pengrajin dengan pedagang pengumpul. Selama ini para pedagang pengumpul hanya menentukan secara sepihak harga produk kerajinan anyaman yang dihasilkan pengrajin. Terjadinya eksploitasi secara sepihak ini semakin menambah ketidakberdayaan para pengrajin selain berbagai faktor lainnya. Upaya keluar dari kondisi ini menurut Kartasasmita (1996) sebagai upaya pemberdayaan dalam arti melindungi masyarakat yang lemah melalui berbagai peraturan yang jelas-jelas melindungi masyarakat yang lemah.

Begitu pula dengan lembaga ekonomi desa (Kopinkra) yang belum berperan dalam menyahuti kebutuhan pengrajin. Selama ini kegiatan Kopinkra hanya bergerak dalam usaha

simpan pinjam, padahal sebagai wadah berhimpunnya pengrajin, seharusnya fungsinya juga sebagai lembaga penyedia berbagai sarana produksi serta penampung hasil produksi para pengrajin. Raharjo dan Rinakit (1996) melihat bahwa kurang berfungsinya lembaga koperasi di pedesaan merupakan salah satu bukti terjadinya *kemandekan birokrasi* sehingga berakibat pada ketidakberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya dukungan yang oleh Martius (1997) diistilahkan dengan corak kelembagaan yang akomodatif dan dapat menyahuti berbagai kebutuhan anggotanya dalam upaya pemanfaatan sumberdaya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sementara pada tataran instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan program dan pembinaan usaha, juga terdapat beberapa kendala yang berdampak pada kurang maksimalnya upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang dijalankan. Apabila dite-lusuri lebih jauh, kendala itu meliputi:

Pertama, kurang responsifnya instansi terkait di tingkat atas dalam pembuatan kebijakan dan program yang dapat menyahuti kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Akibatnya program-program pembinaan yang dijalankan kurang menemui sasaran dengan hasil yang optimal karena pada tataran pengrajin merasa tidak membutuhkannya. Pemaparan salah seorang pengrajin membuktikan kondisi yang demikian: *"Kami diberikan pelatihan tentang cara-cara mewarnai anyaman di Desa Kubang, padahal keterampilan itu telah kami kuasai dengan baik sehingga tidak begitu dibutuhkan lagi. Yang sangat dibutuhkan kami sekarang adalah bagaimana produk anyaman ini*

memiliki pasaran yang jelas sehingga kami bisa berproduksi secara rutin".

Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun program telah disusun berdasarkan permasalahan yang muncul dari bawah, namun pemahaman dan dinamikanya di tingkat atas (baca: pemerintah) yang terwujud melalui pelaksanaan program pembinaan, belum tentu sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Prijono (1996) mengisyaratkan bahwa secara implisit, proses pemberdayaan rakyat bermakna adanya inisiatif yang berasal dari rakyat dan peranan pemerintah menampung serta mempertimbangkan keluhan rakyat. Aparat pemerintah harus memiliki kepekaan dan kemampuan untuk dapat merespon inisiatif dan keluhan masyarakat di tingkat bawah.

Kedua, belum adanya keterpaduan yang solid antar instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Walaupun temuan lapangan menunjukkan bahwa adanya keterpaduan dalam pelaksanaan, namun itu hanya sebatas memenuhi target tanpa adanya upaya yang lebih terarah dan matang untuk merealisasikannya. Sehingga kegiatan penyuluhan pada satu sisi menjadi ajang bagi instansi terkait untuk menyampaikan program instansinya, dan di sisi lain, masyarakat hanya sebatas memberikan respon di dalam forum kegiatan penyuluhan tanpa adanya tindakan nyata dan berkelanjutan setelah keluar dari forum itu. Ilustrasi melalui wawancara dengan salah satu instansi terkait, yakni Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh sebagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat dengan fokus pembinaan pada aspek permo-

dalam usaha membuktikan sinyalemen tersebut: *"Adapun salah satu kendala dari pihak kami selama melakukan program perkreditan bagi pelaku industri kecil pedesaan yang tanpa agunan adalah lemahnya kontrol dan monitoring dari Dinas terkait dalam mengawasi penggunaan kredit. Sehingga umumnya kredit tidak tepat sasaran dan banyak digunakan untuk kegiatan non produktif di luar usaha mereka, yang akhirnya berdampak pada kemacetan pengembalian kredit"*.

Sistem monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sangat berkaitan erat dengan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi rakyat, dan ini menurut Sjafrizal (1997) lebih jauh dijelaskan bahwa keterpaduan dalam pelaksanaan program memerlukan sistem monitoring yang sistematis dan terarah. Ada indikasi bahwa sistem monitoring yang telah digunakan masih lemah dan belum mempunyai sistem yang jelas dan sistematis.

Untuk keluar dari kendala ini, pada program pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya telah dilaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi antar instansi terkait, namun itu diduga Sjafrizal (1997) kurang menemui sasaran. Walaupun rapat monitoring secara berkala sering diadakan, akan tetapi tujuan utamanya hanya untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan program. Sementara monitoring yang secara konkret menuju ke arah keterpaduan pelaksanaan antar program-program terkait masih belum dapat dilaksanakan karena sangat banyaknya jumlah program yang dimonitor.

c. Keterbatasan Konsep Lokal Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Konsep lokal pemberdayaan ekonomi rakyat mempunyai beberapa keterbatasan, baik ditinjau dari sisi sampel maupun dari sisi analisis. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi subjek dan tujuan penelitian ini. Secara umum keterbatasan itu meliputi: *pertama*, konsep ini lebih memfokuskan kajiannya pada aspek deskriptif- kualitatif dengan konsep utama berupa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki oleh Kartasasmita (1996) yang menjadi salah satu paradigma dalam pembangunan pedesaan; *kedua*, penggunaan konsep lokal tentang pemberdayaan ekonomi rakyat ini sangat tergantung pada kondisi lokal dan tidak bisa digeneralisir untuk lokasi atau tingkatan yang lebih luas kecuali pada lingkungan sosial ekonomi dan budaya yang homogen dengan lokasi penelitian ini; *ketiga*, walaupun studi ini sudah berusaha mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, tapi tidak semua data dan informasi yang diperoleh bisa dirangkum secara rinci dan mendalam karena keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, baik menyangkut lamanya studi maupun keterbatasan sumberdaya.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Karakteristik ekonomi rumah tangga mayoritas pengrajin anyaman di Desa Taratak berada pada kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang diperlihatkan dengan banyaknya keterbatasan dalam hal kepemilikan terhadap

aspek sumberdaya manusia produktif. Adapun keterbatasan itu meliputi: rendahnya status sosial, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketidakberanian mengambil resiko untuk menjadikan usaha kerajinan anyaman sebagai pekerjaan utama rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan usaha kerajinan anyaman yang dilakukan rumah tangga pengrajin masih tergolong berskala kecil yang hanya diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saja.

- b. Usaha kerajinan anyaman sebagai komoditi unggulan di Desa Taratak selama ini belum mampu berkembang karena disebabkan rendahnya akses terhadap sumberdaya ekonomi produktif yang meliputi beberapa aspek, yakni: *pertama*, rendahnya akses terhadap permodalan dan struktur permodalan yang masih skala kecil, sehingga mengakibatkan terjadinya marginalisasi usaha dan belum adanya peluang untuk mengakses permodalan dari perbankan menjadikan kemungkinan ke arah pengembangan usaha terbatas; *kedua*, terbatasnya akses terhadap pasar, dimana pemasaran produk kerajinan anyaman didominasi oleh pedagang pengumpul (*toke*) yang cenderung merugikan pengrajin dalam bertransaksi, sehingga menyulitkan perkembangan usaha; *ketiga*, keterbatasan akses terhadap sarana prasarana pendukung, dimana belum tersedianya prasarana jalan antar desa dan sarana transportasi yang memadai, serta ditambah dengan keterisoliran letak desa menambah

ketidakberdayaan pengrajin dalam pengembangan usaha

- c. Strategi dan program yang telah dijalankan pemerintah selama ini belum berperan dalam memberdayakan ekonomi rakyat (usaha kerajinan anyaman) di Desa Taratak karena disebabkan oleh akumulasi persoalan yang terdapat pada tataran kelembagaan yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi rakyat

Implikasi Teori

- a. Konsep lokal tentang pemberdayaan ekonomi rakyat ini memiliki spesifikasi khusus, karena bisa dialokasikan sebagai konsep dasar untuk menyusun program pemberdayaan ekonomi rakyat yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Dalam menyusun program untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan diperlukan adanya berbagai batasan, sehingga tidak seluruh masyarakat memperoleh penekanan yang sama dari program. Pada posisi inilah konsep ini berperan, dimana keheterogenan karakteristik rumah tangga miskin dan kelompok masyarakat miskin di pedesaan, sangat menentukan tipologi program pemberdayaan ekonomi rakyat pada khususnya dan program pengentasan kemiskinan pada umumnya yang sesuai dan tepat.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan tiga sisi, yakni : (1) menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) upaya untuk memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masya-

rakat, serta (3) upaya untuk melindungi golongan masyarakat yang lemah dan miskin melalui berbagai peraturan dan anggaran yang pro rakyat miskin (*pro-poor budget*)

- c. Perlu semakin mengurangi peran pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan pedesaan, dan pada sisi inilah mengemuka terminologi pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan pedesaan itu sendiri. Peran pemerintah hanya sebatas menjaga iklim yang mendukung (kondusif) terhadap aktifitas potensi sumberdaya lokal dan memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan yang melindungi golongan masyarakat yang lemah dan miskin dari eksploitasi golongan yang memiliki sumberdaya yang kuat.

Implikasi Praktis

- a. Berdasarkan analisis karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga pengrajin anyaman, maka disarankan agar dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat, adanya suatu kajian komprehensif dan mendalam tentang aspek sumberdaya manusia. Ini diperlukan karena tidak seluruh masyarakat membutuhkan program dengan penekanan yang sama. Dengan memahami karakteristik sumberdaya manusia rumah tangga, maka pada akhirnya akan dapat disusun program yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga miskin di pedesaan.

- b. Berdasarkan analisis karakteristik usaha ekonomi rakyat kerajinan anyaman, maka disarankan untuk melakukan upaya yang terpadu dalam memberikan akses yang seluas-luasnya bagi pengrajin terhadap sumberdaya ekonomi produktif, yakni : *pertama*, penetrasi modal melalui pemanfaatan fasilitas modal pemerintah dan perbankan, serta melalui kerjasama kemitraan dengan BUMN/BUMD/Swasta; *kedua*, memfungsikan Koperasi Industri Kerajinan (Kopinkra) sebagai wadah penampung produk pengrajin untuk mewujudkan lembaga pemasaran bersama dan terpadu, sehingga Kopinkra sebagai perusahaan inti dalam bernegosiasi dan bertransaksi akan berfungsi efektif sebagai koordinator dalam kegiatan pemasaran, promosi, penetapan kualitas, dan penetapan harga; *ketiga*, pembenahan dan rehabilitasi berbagai sarana prasarana pendukung bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat (pasar desa, jalan desa, transportasi desa, dll)
- c. Berdasarkan analisis terhadap kelembagaan yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, maka disarankan agar ditumbuhkan dan diperkuat kepedulian dan kerjasama yang intensif di antara lembaga yang terlibat dalam memfasilitasi kebutuhan pengrajin untuk pengembangan usaha rumah tangga mereka. Hal ini meliputi : *pertama*, adanya aturan-aturan yang melindungi pengrajin dari eksploitasi para pedagang pengumpul/toke (kaum kapitalis desa);

kedua, perwujudan peran Kopin-kra sebagai wadah yang benar-benar berpihak pada pengrajin; *ketiga*, perlunya kajian mendalam dari instansi pelaksana dan pembina program terhadap karakteristik masyarakat sebelum suatu program disusun dan dilaksanakan.

Agenda Penelitian ke Depan

Penelitian ini pada intinya hanya mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi rakyat pada skala mikro (yakni: desa) dengan analisis berdimensi luas menyangkut seluruh aspek yang berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Sejatinya, pemberdayaan ekonomi rakyat selain berdimensi ekonomi, juga berdimensi sosial, politik, dan budaya. Berangkat dari temuan penelitian ini, ada beberapa agenda penelitian ke depan yang perlu dicermati dan dilakukan oleh pihak yang berminat mendalami isu pemberdayaan dan kemiskinan, yakni:

- a. Perlu diteliti bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat tidak terbatasnya hanya pada skala kecil (desa/nagari), melainkan pada skala yang lebih luas, baik secara administratif (pembangunan kecamatan, misalnya) maupun secara fungsional (pembangunan wilayah/ kawasan)
- b. Perlu diteliti pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat dengan penekanan studi pada kajian kelembagaan, baik pengelolaan program, mekanisme program, maupun penumbuhan kembali (revitalisasi) keberfungsian lembaga di

tingkat lokal. Ini terkait dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

- c. Perlu dikaji tentang pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat pada dua desa/nagari yang berbeda dalam status (miskin dan maju) dengan mayoritas masyarakatnya bergerak pada komoditi unggulan yang sejenis. Pada akhirnya diperlukan adanya perbedaan dalam konsep, strategi, pendekatan, dan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.
- d. Perlu dikaji pemberdayaan masyarakat/ekonomi rakyat pada desa/nagari yang memiliki komoditi unggulan selain sub sektor industri kecil, seperti: pada sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), serta sektor lainnya (seperti pariwisata, dll)

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revisond. 1997. Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Artikel Majalah Islam Media Dakwah Edisi Desember 2007
- Firdausy, Carunia Mulya. 1997. Pengembangan Potensi Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Biak Numfor Irian Jaya. Jurnal Analisis CSIS Tahun XXVI No. 1 (Januari – Februari 1997)
- Ichsan. 1994. Strategi Pembangunan Pedesaan pada PJPT II. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial No. 1 Januari 1994
- Juoro, Umar. 1998. Aspek Pengembangan Sumberdaya Manusia di Pedesaan.
-

- Artikel Harian Media Indonesia Edisi Rabu 8 April 1998
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Pustaka Cidesindo. Jakarta
- Kuncoro. 1997. Pemberdayaan Kelompok Kerja. Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun. Penerbit CSIS. Jakarta
- Martius, Endry. 1997. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Makalah Diskusi Ilmiah Agama PPS Universitas Andalas tanggal 27 November 1997
- Moeljarto, Vindhyandika. 1996. Pemberdayaan Kelompok Miskin melalui Program IDT. Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun. Penerbit CSIS. Jakarta
- Nugroho, Heru. 1997. Institusi Mediasi sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Lapis Bawah. Jurnal Analisis CSIS Tahun XXVI No 1 (Januari – Februari 1997)
- Pranarka dan V. Moeljarto. 1996. Pemberdayaan (Empowerment). Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun. Penerbit CSIS. Jakarta
- Januari 1997
- Prijono, Onny. 1996. Organisasi Non Pemerintah (NGO's): Peran dan Pembedayaannya. Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun. Penerbit CSIS. Jakarta
- Prijono, O dan AW. Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun. Penerbit CSIS. Jakarta
- Raharjo dan Rinakit. 1996. Pemberdayaan Masyarakat Petani. Jurnal Ilmiah CSIS Edisi 25 Tahun. Penerbit CSIS. Jakarta
- Sarman. 1997. Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Pelajaran dari Program IDT). Jurnal PRISMA Edisi 1 Januari 1997
- Sjafrizal, dkk. 1997. Analisis Komoditi Andalan Propinsi Sumatera Barat. Hasil Penelitian Tim Pokja Ristek Dewan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri (DIPTI) Sumatera Barat
- Tambunan, Tulus. 1995. Pola Pembangunan Ekonomi di Pedesaan. Artikel Ilmiah PRISMA Edisi 1